

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.3259](https://doi.org/10.36859/JP.V2I1.3259)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 06 Februari 2025 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 14 Februari 2025

KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jenal Arifin¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah tidak efektifnya pemberdayaan UMKM di Kecamatan Padalarang menurut dugaan disebabkan oleh kepemimpinan Camat Padalarang belum optimal berdasarkan teknik-teknik kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini dari Pamudji (1995) yang meliputi: "Teknik Pematangan/Penyiapan Pengikut, Teknik *Human Relations*, Teknik Menjadi Teladan, Teknik Persuasi dan Pemberian Perintah, Teknik Penggunaan Sistem Komunikasi Yang Cocok dan Teknik Penyediaan Fasilitas". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan camat dalam pemberdayaan UMKM, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan Camat dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian meliputi camat, staf, ketua kelompok UMKM, dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta memfasilitasi UMKM dalam hal tempat usaha dan pemasaran. Di Kecamatan Padalarang terdapat 70 UMKM unggulan, seperti aneka bordir, kerajinan tulang ikan, dan makanan olahan singkong. Hambatan utama dalam pemberdayaan UMKM meliputi keterbatasan modal, kurangnya keterampilan manajerial, dan strategi pemasaran. Upaya yang dilakukan camat untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi bekerjasama dengan lembaga pemasaran produk, baik lembaga pemerintah maupun agen penjualan, Pelatihan dari Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya, dan memasukkan pembinaan dan pengembangan UMKM kedalam dokumen (Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Kata Kunci: Kepemimpinan, Camat, UMKM.

Abstract

The problem in this study is the ineffectiveness of empowering MSMEs in Padalarang District, which is thought to be caused by the Padalarang District Head's leadership not being optimal based on leadership techniques. The leadership theory used in this study is from Pamudji (1995) which includes: "Follower Maturation/Preparation Techniques, Human Relations Techniques, Role Model Techniques, Persuasion and Command-Giving Techniques, Techniques for Using Appropriate Communication Systems, and Facilities Provision Techniques". This study aims to analyze the leadership of the sub-district head in empowering MSMEs, the obstacles faced, and the efforts made by the sub-district head in overcoming these obstacles. This study

uses a descriptive method with a qualitative approach. Research informants include the sub-district head, staff, MSME group leaders, and MSME actors. The results of the study show that the sub-district head has coordinated with various agencies and facilitated MSMEs in terms of business premises and marketing. In Padalarang District there are 70 superior MSMEs, such as various embroidery, fish bone crafts, and cassava processed foods. The main obstacles in empowering MSMEs include limited capital, lack of managerial skills, and marketing strategies. Efforts made by sub-district heads to overcome these obstacles include collaborating with product marketing institutions, both government institutions and sales agents, training from universities in the city of Bandung and its surroundings, and including the development and coaching of MSMEs in the document (Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes).

Keywords: Leadership, District Head, MSME.

PENDAHULUAN

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih merata, Negara Indonesia dibagi ke dalam daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 amandemen ke dua yang berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan kekhasan suatu daerah. Setiap daerah di dalam mengatur urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat perlu adanya partisipasi masyarakat

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan di suatu daerah dilakukan untuk mendorong perubahan, yang sehingga daerah menjadi maju. Sekarang ini, daerah dituntut untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas umum serta melakukan pemberdayaan masyarakat daerah. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas suatu daerah yang tidak lepas dari kerjasama antara pihak swasta maupun masyarakat.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengatas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan nomer satu penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena UMKM memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Menciptakan suatu UMKM memang tidak mudah diperlukan modal yang cukup dan keterampilan dalam mengelola usaha. Dengan adanya otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah mengatur secara langsung kegiatan ekonomi di daerahnya sehingga memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM yaitu keterbatasan modal usaha, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan teknologi, keterbatasan bahan baku dan kesulitan pemasaran.

Masalah keterbatasan modal usaha, Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Masalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), banyak UMKM yang belum mampu mengelola SDM mereka dengan baik dan

profesional untuk mendukung pertumbuhan usaha. Beberapa permasalahan SDM yang dihadapi oleh UMKM antara lain: Kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan terampil sesuai dengan bidang usaha, dan Kurangnya pengembangan SDM yang dilakukan secara berkesinambungan, seperti pelatihan, pendidikan, atau sertifikasi. Masalah keterbatasan teknologi, yang mana perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini melahirkan geliat ekonomi digital yang justru membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM, tidak hanya dalam memasarkan produknya tetapi juga memudahkan proses produktivitas para pelaku UMKM.

Banyak pelaku UMKM yang tidak tahu-menahu tentang kemajuan teknologi serta tidak bisa mengoperasikannya. Kondisi gagap teknologi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, lokasi wilayah, dan lain sebagainya. Keterbatasan bahan baku, UMKM sektor kuliner juga sering dihadapkan pada tantangan ketersediaan pasokan bahan pangan. Bukan hanya ketersediaan, harga yang cenderung berfluktuasi juga bisa jadi hambatan tersendiri bagi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Masalah kesulitan pemasaran, Permasalahan UMKM selanjutnya terletak pada masalah pendistribusian barang. Selama ini banyak pelaku UMKM kekurangan channel dalam mendistribusikan produknya. Kebanyakan hanya fokus mendistribusikan barang kepada beberapa kolega dan pengepul yang dikenalnya saja. Tentu cara pemasaran seperti ini masih sangat sederhana dan jangkauannya belum terlalu luas.

Kecamatan Padalarang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang perkembangannya cukup pesat, dimana terjadi transisi dari penduduk pedesaan menuju penduduk perkotaan. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kabupaten Bandung Barat tahun 2023, di Kecamatan Padalarang terdapat 1.653 UMKM yang terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari warung, usaha makanan, usaha counter hp dan usaha lainnya.

No	Jenis UMKM	Jumlah (unit)
1	Industri Kecil	63
2	Indutsri Rumah Tangga	10

3	Toko/Kios/Warung	1.580
	Jumlah	1.653

Sumber: *BPS: Kecamatan Padalarang dalam Angka Tahun 2023*

Berdasarkan hasil penelitian penjajakan, diketahui yang menjadi penghambat sulitnya mengembangkan usaha adalah kesalahan perencanaan dalam mengelola modal guna memenuhi kebutuhan usaha sehingga sering terjadi kekurangan modal usaha. Pada aspek sosial kurangnya kerjasama antar pelaku UMKM, yang mana sampai saat ini belum ada lembaga atau wadah yang menaungi para pelaku UMKM tersebut. Faktor selanjutnya adalah ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah dalam menjalankan usahanya, seperti para pelaku UMKM makanan masih menggunakan cara lama dalam pengemasannya sehingga pengemasan masih tradisional, dan rendahnya generasi muda yang terjun menekuni usaha mikro ini, dimana angkatan kerja yang ada lebih tertarik dan bekerja di daerah perkotaan atau menjadi buruh pabrik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Rincian Tugas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang salah satunya adalah: “Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, tidak efektifnya pemberdayaan UMKM di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menurut dugaan peneliti disebabkan oleh kepemimpinan Camat Padalarang belum optimal berdasarkan teknik-teknik kepemimpinan. Hal tersebut terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Teknik pematangan/penyiapan pengikut, terlihat dari kurang intensnya pembinaan para pelaku UMKM oleh Pemerintah Kecamatan Padalarang.
2. Teknik *human realtions*, terlihat dari kurangnya perhatian Camat Padalarang terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM;

3. Teknik menjadi teladan, Camat Padalarang kurang dalam mendengar aspirasi maupun masukan baik dari aparat bawahan maupun pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang tentang kondisi nyata pelaku UMKM di lapangan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Kepemimpinan Camat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, termasuk hambatan-hambatan yang muncul dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang, serta upaya-upaya yang dilakukan Camat Padalarang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan/menggambarkan data pada masa sekarang (sedang terjadi). Nawawi (2001,63-64) mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya". Adapun ciri-ciri pokok metode deskriptif adalah:

1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Adapun pendekatan dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln (dalam Alwasilah, 2002:105) bahwa: "metode inilah yang lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi. Mereka juga dinilai lebih sensitif terhadap segala aspek dan perubahan yang saling mempengaruhi yang bakal dihadapi oleh peneliti".

Menurut Arikunto (1998:132) yang dimaksud dengan unit analisis adalah: "satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian". Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan informan Camat Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Staf Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Ketua Kelompok UMKM, dan pelaku UMKM.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara atau interview menurut Nawawi (2001:111) adalah: "Usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula", observasi menurut Nawawi (2001:100) mengemukakan pengertian observasi sebagai: "Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian". Adapun peneliti akan mengobservasi Kecamatan Padalarang dan tempat usaha UMKM, studi dokumentasi dan Kepustakaan menurut Nawawi (2001:133) adalah: "Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian".

Dalam penelitian ini data diperoleh pula dari sumber non manusia, yaitu dokumen-dokumen antara lain laporan-laporan, peraturan-peraturan, notulen rapat, buku harian dan sebagainya yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, juga berbagai foto yang menggambarkan tempat, pelaku dan kegiatan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan menelaah kembali seluruh catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi yang keseluruhannya dirangkum. Dalam display data, seluruh data dirangkum secara lebih sistematis agar mudah diketahui temanya yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan setelah jelas maka peneliti dapat membuat kesimpulan.

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan menggunakan member check, mengadakan triangulasi.

Ketiga macam kegiatan analisis data yang dikemukakan diatas saling berhubungan dan berlangsung terus selama penelitian berlangsung. Jadi analisis data adalah kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah tentang reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul, namun dua hal lainnya itu senantiasa merupakan bagian dari lapangan.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengatasi kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah disamping menegembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peranan pemerintah, lembaga – lembaga keuangan dan pelaku usaha. Peranan pemerintah disini adalah memutuskan kebijakan – kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan disini jelas sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan pemerdayaan UMKM dan pelaku usaha itu sendiri memiliki peranan pokok bagi perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM.

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan

perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, oleh karena itu pelaku UMKM perlu bimbingan dari pemerintah termasuk dari Camat selaku pimpinan di wilayah kecamatan.

Camat selaku pemimpin di wilayah Kecamatan mempunyai peran strategis dalam memberdayakan masyarakatnya termasuk memberdayakan pelaku UMKM yang ada di wilayahnya. Dalam kaitan dengan skripsi ini yang berjudul Kepemimpinan Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, peneliti membagi menjadi 3 (tiga) sub bab pembahasan yaitu:

1. Kepemimpinan Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat; dan
3. Upaya-upaya yang dilakukan Camat Padalarang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kepemimpinan Camat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan yang merupakan bentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah. kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Dengan memandang Kecamatan sebagai bentuk organisasi, maka kerja sama yang solid dan kepemimpinan dari seorang camat untuk mencapai tujuan

adalah upaya rasional yang harus dilakukan oleh seorang camat dalam menjalankan roda organisasinya.

Kecamatan Padalarang merupakan Kecamatan yang memiliki letak strategis yang berada di tengah-tengah lintasan Kabupaten Bandung Barat. Berada ditengah jalur Bandung-Purwakarta-Jakarta, Bandung-Cianjur-Sukabumi, yang mana perkembangan masyarakatnya cenderung modern dan mempunyai tingkat kesibukan yang tinggi sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat aparatur Pemerintah hal ini tidak akan terwujud jika dalam kepemimpinan seorang camat tidak optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Rincian Tugas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, salah satu tugas Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang salah satunya adalah: "Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat". Berkaitan dengan Kepemimpinan Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, peneliti membahasnya berdasarkan kepada teori Teknik-teknik kepemimpinan menurut Pamudji (1995:114-121) yaitu:

1. Teknik pematangan/penyiapan pengikut

Sebagai seorang pimpinan yang membawahi beberapa orang pegawai yang bekerja dalam organisasi yang dipimpinnya, camat dalam menjalankan peran, tugas, dan kewajibanya harus dapat bekerja sama dengan sekelompok orang atau pegawai yang ada dalam instansi atau organisasi maupun dengan masyarakat yang dipimpin di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, selaku pemimpin camat harus melakukan teknik pematangan/penyiapan pengikut. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

a. Adanya koordinasi

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling

melengkapi. Salah satu tugas pokok camat sebagai pemimpin kecamatan adalah melaksanakan koordinasi kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

b. Adanya program kerja

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini, berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian UMKM.

2. Teknik *human relations*

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki karakteristik berbeda dengan perangkat daerah maupun organisasi pemerintah daerah lainnya. Jabatan camat di samping memimpin satu unit pemerintahan yang menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang multisektoral juga melaksanakan tugas kewilayahan karena memiliki wilayah kerja tertentu.

Dalam suatu organisasi, penerapan *Human Relationship* yang baik serta Beban Kerja yang efektif tentunya akan membawa semangat bagi tenaga kerja. Dengan adanya hal ini akan berpengaruh baik pada kinerja dari setiap aparat sehingga tujuan dari satu organisasi dapat tercapai dengan baik tidak terkecuali di Kecamatan Padalarang tentunya akan menjadi baik. Kecamatan Padalarang di Kabupaten Bandung Barat terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagai instansi yang bertugas menjadi pembina UMKM di wilayah ini, Pemerintah Kecamatan Padalarang yang dipimpin oleh Camat memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan strategi menekan angka penganguran dan kemiskinan di wilayah ini antara lain melalui pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal lewat pemberdayaan UMKM.

Berkaitan dengan dimensi teknik *human realtions* peneliti menetapkan indicator sebagai berikut:

a. Adanya pemberian motivasi

UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi disaat perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.

b. Adanya penghargaan

Sektor UMKM merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang memiliki dampak juga efek yang cukup besar untuk menolong tumbuh kembangnya perekonomian bagi masyarakat. Dengan adanya UMKM dapat menyerap tenaga kerja setempat. Peranan UMKM tersebut saat ini sangatlah penting, dikarenakan UMKM bukan saja sebagai tempat mata pencaharian bagi pelaku usaha ataupun banyak orang tetapi juga sebagai tempat ataupun penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat hal ini mendorong UMKM untuk terus mampu eksis dan berkembang.

Salah satu cara untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan UMKM adalah adanya pemberian penghargaan kepada pelaku UMKM. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi UMKM dalam mengembangkan usahanya.

3. Teknik menjadi teladan

Salah satu langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar perekonomian Indonesia adalah dengan mengembangkan dan memajukan UMKM. Dalam perkembangannya UMKM banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, diantaranya memberikan peran dalam menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusinya terhadap pendapatan negara.

Kegiatan UMKM biasanya dilakukan di rumah-rumah pribadi atau ruko-ruko kecil dalam pedesaan sampai pada tingkat kecamatan. Oleh

karena itu peran pemerintah dilevel bawah seperti kades dan camat sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan UMKM di wilayahnya.

Seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam menjalankan kepemimpinannya. Prinsip tersebut juga harus dimiliki oleh camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu pula dalam mengambil keputusan, seorang camat juga harus memiliki sikap tegas yang bijaksana. Suatu contoh yang kurang baik jika camat menitipkan pesan setiap masyarakat harus mematuhi aturan, sementara camat tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu konsekuensi dari seorang pemimpin selain bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas-tugasnya, juga harus mampu memberikan contoh baik dalam masyarakat, dan bersikap tegas dan bijaksana.

Berkaitan dengan dimensi teknik menjadi teladan, peneliti menetapkan indicator sebagai berikut:

a. Adanya pemberian contoh

Perkembangan UMKM yang sangat pesat dapat membantu pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi ini ditunjang dengan pembangunan industri baik industri manufaktur, industri minyak dan gas, industri jasa transportasi, industri perdagangan, dan berbagai industri lain sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Namun tidak dapat dipungkiri ada beberapa masalah yang dihadapi oleh industri kecil memiliki banyak kelemahan dimana hal tersebut haruslah diantisipasi dengan solusi konkret tidak hanya oleh pelaku industri tersebut namun didukung juga oleh pemerintah serta masyarakatnya dan penggerak UMKM lainnya. Jika industri kecil terpuruk maka akan mengakibatkan terganggunya stabilitas perekonomian lokal dan nasional.

Guna mendukung keberlangsungan UMKM diperlukan suatu teladan dari pemimpin di wilayah di mana UMKM tersebut berada, salah satunya dengan cara pemimpin tersebut memberikan teladan bagi aparatur bawahannya maupun masyarakat yang dipimpinnya dalam menggunakan produk UMKM sehari-hari.

b. Camat terjun langsung ke lapangan

Dengan turunnya Camat langsung ke lapangan untuk melihat kondisi UMKM yang ada di Kecamatan Padalarang akan terlihat dan tergambar potensi dan permasalahan UMKM yang ada di Kecamatan Padalarang. Agar pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM di Kecamatan Padalarang dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, berupa pembinaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat dan juga dari pihak Perbankan serta dukungan dari masyarakat berupa adanya partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan UMKM di Kecamatan Padalarang.

4. Teknik persuasi dan pemberian perintah

Pemberdayaan yang sering menjadi andalan pemerintah salah satunya yaitu dengan mendorong masyarakat untuk mendirikan sebuah kUMKM. UMKM sangat penting untuk meningkatkan usaha-usaha kecil dan menengah yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah. UMKM merupakan suatu usaha yang mempunyai fungsi untuk mengembangkan potensi pelaku/pemiliknya dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UMKM mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan perokonomian masyarakat, contohnya dengan UMKM masyarakat mampu membuat usaha-usaha sesuai keahlian dan bidangnya untuk mendapatkan penghasilan, dengan demikian perekonomian di daerah tersebut akan meningkat.

Selaku instansi pembina UMKM tingkat Kecamatan, maka Camat Padalarang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah.

Berkaitan dengan dimensi teknik persuasi dan pemberian perintah, peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

a. Adanya pendekatan pribadi

Camat Padalarang telah berupaya sekuat tenaga melakukan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang berpartisipasi pada kegiatan pembinaan UMKM di Kecamatan Padalarang maupun di setiap Desa.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kecamatan Padalarang juga meminta kepada jajaran Aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Padalarang terkait Potensi Desa yang dapat dijadikan sumber pemasukan Desa. UMKM merupakan salah satu potensi sumber pendapatan Desa, sehingga dinilai perlu untuk diberdayakan. Oleh sebab itu, maka Pemerintah Desa wajib untuk memasukan pemberdayaan UMKM ke dalam RKPDes.

b. Adanya pemberian perintah

Pemberian perintah dari Camat kepada bawahan maupun masyarakat atau pelaku UMKM adalah berupa ajakan, pemberian motivasi dan pembinaan kepada pelaku UMKM. Sikap Camat Padalarang ini tentunya didasarkan pada tugas yang bukan wewenangnya, akan tetapi Camat secara hierarki sebagai aparat pemerintah terbawah memiliki tanggung jawab dalam memerintahkan masyarakat untuk mengikuti program pembangunan, pemberdayaan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program pembinaan UMKM dinilai sangat penting karena dapat memotivasi para peserta dalam mengikuti proses program pembinaan UMKM untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Proses program pembinaan UMKM tidak hanya berhenti sampai mereka selesai menjalani program pembinaan UMKM Kecamatan Padalarang, namun implementasi dari program pembinaan UMKM yang mereka dapatkan itu akan terus dipantau hingga para peserta dinilai sudah dapat mandiri dalam menjalankan usahanya.

5. Teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok

Seorang pemimpin harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, mengetahui keinginan masyarakat, dan mengetahui segala perkembangan yang ada dalam masyarakat. Pemimpin harus mampu

menyesuaikan sistem adat dan kebiasaan masyarakat yang diperintahnya, dengan itu pemimpin dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mengetahui teknik penggunaan system komunikasi yang cocok dari kepemimpinan Camat indikator yang peneliti gunakan yaitu:

a. Adanya komunikasi

Pemerintah Kecamatan berkomunikasi jika ada kegiatan saja. Hal ini dapat dilihat dimana komunikasi yang terjalin hanya sebatas ketika ada pertemuan ataupun rapat saja. Belum adanya forum khusus secara tatap muka yang dilakukan oleh pengurus kepada anggota komunitas ini”.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa salah satu bentuk komunikasi dalam Program Pembinaan UMKM yang dilaksanakan dan dilakukan melalui pemasangan spanduk di Kantor Kecamatan Padalarang, sedangkan Sosialisasi Program Pembinaan UMKM yang di fasilitasi Kantor Kecamatan bersama Dinas Teknis Terkait dilaksanakan oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada masyarakat dengan cara mengundang para Kepala Desa, TP PKK, sampai Ketua RT/RW setempat dan pelaku UMKM dalam rapat guna menyampaikan maksud dan tujuan akan diadakannya Program Pembinaan UMKM pada desa-desa di Kecamatan Padalarang.

b. Penggunaan bahasa daerah

Seorang pemimpin dalam melakukan komunikasi dengan bawahan maupun pengikutnya harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga apapun yang diperintahkan atau diminta oleh pemimpin mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, salah satu teknik yang harus dikembangkan adalah seorang pemimpin harus menggunakan bahasa yang daerah atau bahasa setempat.

Dengan komunikasi yang baik semua informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya. Oleh karena itu untuk menciptakan UMKM yang maju, berkembang dan handal serta memiliki ketahanan ekonomi, maka harus terjalin komunikasi yang baik antar stakeholders baik itu dari Pemerintah Kecamatan Padalarang, pelaku UMKM, Dinas terkait dan lainnya.

6. Teknik penyedian fasilitas

UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestic bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. UMKM akan semakin berkembang jika diberikan kemudahan dalam hal fasilitas yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut.

Oleh karena itu, seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya juga harus mampu menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh pelaku UMKM. Berkaitan dengan teknik penyedian fasilitas, peneliti menetapkan indikator sebagai berikut:

a. Adanya sarana dan prasarana

Program pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan keterampilan usaha merupakan langkah strategis yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM. Program ini dapat mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM. Program pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang terstruktur dan menyeluruh seperti ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku UMKM. Dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya, UMKM dapat menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. Program pembinaan dan pemberdayaan UMKM tidak akan bisa berjalan jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai

Hambatan-hambatan yang muncul dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat

Manajemen Usaha, UMKM merupakan salah satu kegiatan yang dapat memberikan andil dalam perekonomian masyarakat yang salah satunya adalah masyarakat desa. Demikian pula UMKM yang berada di Kecamatan Padalarang akan memberikan andil terhadap masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Padalarang. Manajemen usaha merupakan kegiatan yang

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh UMKM. Manajemen usaha memerlukan keterampilan- ketrampilan tertentu yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha seperti keterampilan konseptual, keterampilan hubungan sosial, dan keterampilan teknikal. Masih kurangnya keterampilan manajemen usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM akan berdampak pada kinerja UMKM itu sendiri. Kondisi ini terjadi pada sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Modal, modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Modal merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha, karena modal digunakan untuk membeli bahan dasar, peralatan, dan biaya operasional lainnya. Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya walaupun modal tersebut seadanya. Pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang sangat berharap ada bantuan modal, kalaupun itu adalah pinjaman tetapi cicilannya harus terjangkau dan tidak memberatkan pelaku UMKM.

Pemasaran, Strategi pemasaran merupakan salah satu cara dalam mengenalkan produk kepada konsumen, dan hal ini menjadi penting karena akan berhubungan dengan laba yang akan dicapai oleh UMKM. Strategi pemasaran akan berguna secara optimal bila didukung oleh perencanaan yang terstruktur baik dalam segi internal maupun eksternal UMKM. Strategi pemasaran produk UMKM di Kecamatan Padalarang adalah membiarkan pasar berjalan tanpa adanya proteksi khusus untuk produk UMKM dari luar Kecamatan Padalarang. Dimana semua orang, termasuk sales dari luar lingkungan Kecamatan Padalarang, diperbolehkan untuk berjualan di warung-warung, Gerai UMKM dan toko-toko modern seperti Alfa, Indomaret atau Yomart. Pemerintah Kecamatan Padalarang tidak melakukan pembatasan terhadap aktivitas perdagangan dari luar, menunjukkan pendekatan yang terbuka terhadap kegiatan ekonomi di tingkat lokal atau tingkat Kecamatan termasuk tingkat Desa yang ada di wilayah Kecamatan Padalarang.

Upaya-upaya yang dilakukan Camat Padalarang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut

Pemerintah Kecamatan Padalarang telah bekerjasama dengan lembaga pemasaran produk, baik lembaga pemerintah maupun agen penjualan. Hal ini memberikan manfaat yang beragam bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan produk dan penjualan, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut di dalam pemasaran yang terstruktur dan terorganisir.

Pemerintah Kecamatan Padalarang mengundang Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya untuk mengadakan pelatihan, maupun dukungan lainnya dalam strategi pemasaran, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kecamatan Padalarang.

Pemerintah Kecamatan Padalarang telah meminta kepada Pemerintah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Padalarang agar memasukkan pembinaan dan pengembangan UMKM kedalam dokumen (Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga pembinaan dan pengembangan UMKM dapat berlangsung secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa penulis tarik berdasarkan hasil mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian menganalisis data sesuai dengan aktivitas yang telah ditentukan serta menguji keabsahan data yang peneliti paparkan, maka secara keseluruhan dalam penelitian mengenai Kepemimpinan Camat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yakni; Dasar hukum Camat Padalarang melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, fungsi, dan Rincian Tugas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, salah satu tugas Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pemberdayaan UMKM Camat Padalarang telah melakukan koordinasi dengan semua unit kerja instansi vertikal atau otonom di wilayah kerja kecamatan, pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna), juga melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti organisasi masyarakat, organisasi wanita dan organisasi pemuda tingkat kecamatan. Di Kecamatan Padalarang terdapat 70

UMKM unggulan seperti Aneka Bordir, kerajinan tulang ikan, makanan olahan singkong, dan lainnya. Program lainnya yang diinisiasi oleh Camat Padalarang bekerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Pemodal Nasional Madani (PNM) adalah program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR). Salah satu cara untuk menumbuh-kembangkan kewirausahaan UMKM adalah adanya pemberian penghargaan kepada pelaku UMKM. Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Camat Padalarang berusaha memberikan contoh dalam membina UMKM dimana Camat Padalarang sering terlihat menyambangi atau mendatangi pelaku UMKM di sekitar Kantor Kecamatan untuk membeli produk-produk UMKM, seperti membeli cemilan kripik pisang atau kripik ubi, sarapan kupat tahu khas Padalarang dan lainnya. Dalam pengembangan UMKM perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, berupa pembinaan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat dan juga dari pihak Perbankan. Camat Padalarang telah berupaya melakukan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM. Hal ini dibuktikan dengan banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang berpartisipasi pada kegiatan pembinaan UMKM di Kecamatan Padalarang maupun di setiap Desa yang ada di wilayah Kecamatan Padalarang.

Salah satu bentuk komunikasi dalam Program Pembinaan UMKM yang dilaksanakan dan dilakukan melalui pemasangan spanduk di Kantor Kecamatan Padalarang, sedangkan Sosialisasi Program Pembinaan UMKM yang di fasilitasi Kantor Kecamatan bersama Dinas Teknis Terkait dilaksanakan oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada masyarakat dengan cara mengundang para Kepala Desa, TP PKK, sampai Ketua RT/RW setempat dan pelaku UMKM. Pemerintah Kecamatan Padalarang tidak menyediakan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM, tetapi memfasilitasi dari segi tempat usaha dimana Pemerintah Kecamatan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat meminta tempat kepada pengusaha-pengusaha agar memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk menjual produknya seperti adanya Galery UMKM di Ikea Kota Baru Parahyanagan, tempat usaha di halaman parkir took modern seperti Alfa, Indomaret dan Yomart maupun lainnya. Beberapa hambatan yang muncul dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat antara lain: Masih kurangnya keterampilan Manajemen Usaha, yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh UMKM. Modal, dimana Sebagian besar pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya walaupun modal tersebut seadanya. Strategi pemasaran, dimana Strategi pemasaran produk UMKM di Kecamatan Padalarang adalah membiarkan pasar berjalan tanpa adanya proteksi khusus untuk produk UMKM dari luar Kecamatan Padalarang. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Camat Padalarang dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain: Pemerintah Kecamatan

Padalarang telah bekerjasama dengan lembaga pemasaran produk, baik lembaga pemerintah maupun agen penjualan. Hal ini memberikan manfaat yang beragam bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Padalarang. Pemerintah Kecamatan Padalarang mengundang Perguruan Tinggi yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya untuk mengadakan pelatihan, maupun dukungan lainnya dalam strategi pemasaran. Pemerintah Kecamatan Padalarang telah meminta kepada Pemerintah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Padalarang agar memasukan pembinaan dan pengembangan UMKM kedalam dokumen (Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Sudantoko, Djoko. 2002. Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djojohadikusumo, Sumitro D. 1985. Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Handayaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.
- Indrawijaya, Adam I. 1989. Perilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru.
- Khumaedi, M. 2012. Realibilitas Instrumen Penelitian Pendidikan (dalam Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Unnes Vol12, issue 1.
- Pamudji. 1995. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Resalawati, Ade. 2011. Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil. Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor. UKM Indonesia. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Silalahi, Ulber. 2002. Pemahaman Praktis Asas-asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Bandung: Andi Tama.
- Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

- Suradinata, Ermaya. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung: Citra Grafika.
- Syafie, Inu Kencana. 1992. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Eresco.
- Tambunan, Tulus. 2012. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-
Isu Penting. Jakarta: LP3ES.
- Thoha, Miftah. 2003. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Republik Indonesia. 2023. Pemerintah Kecamatan Padalarang. Monografi
Kecamatan Padalarang Tahun 2023.